

# Efektivitas Program Literasi Digital Nasional Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Digital pada Pemilih Pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Mengantisipasi Mis-Disinformasi Politik pada Pemilu 2024

(The Effectiveness of the National Digital Literacy Program as an Effort to Improve Digital Literacy of Beginner Voters in the Special Region of Yogyakarta (DIY) to Anticipate Political Mis-Disinformation in the 2024 Election)

Sri Lestari Harjanta <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> slharjanta@amikom.ac.id

\* corresponding author : Sri Lestari Harjanta

## ARTICLE INFO

### Article history

Received June 7, 2024

Revised June 13, 2024

Accepted June 27, 2024

### Keywords :

Digital Literacy;

New Voters;

Election;

### Kata kunci :

Literasi Digital;

Pemilih Pemula;

Pemilu;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024

Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

## ABSTRACT

As the election approaches, it is common for the flow of hoax information and misinformation to increase. Based on data, hoaxes and information disinformation increased in the 2014 and 2019 elections. This condition is also felt ahead of the 2024 election. This condition needs to be anticipated so that the impact of hoaxes and information disinformation does not spread. At more or less the same time, the Central Government created a National Digital Literacy program. This program aims to increase digital literacy for the community, including pupils and students.

Therefore, the aim of this research is to look at the effectiveness of the National Digital Literacy Program as an effort to increase digital literacy among novice voters in the Special Region of Yogyakarta (DIY) to anticipate political mis-disinformation in the 2024 elections. This research took place in the DIY area. The research method used is a qualitative approach. The conclusion of this research is that the National Digital Literacy Program has been implemented in the Special Region of Yogyakarta. This program is implemented in a number of schools and campuses targeting students and college students. There are two indicators of the success of this digital literacy program. First, the DIY Digital Literacy Index is the highest nationally in a row for two years (2021-2022). Second, it can be concluded that this program is effective in anticipating hoaxes and misinformation ahead of the 2024 elections. Students are wiser in consuming news/information on social media. Armed with the Pillars of Digital Literacy, they are not easily consumed by fake news or news whose truth is unclear.

### ABSTRAK :

Jelang perhelatan Pemilu sudah lazim arus informasi hoax, dis-mis informasi meningkat. Berdasarkan data, hoax dan dis-mis informasi meningkat pada Pemilu 2014 dan 2019. Kondisi ini juga dirasakan jelang Pemilu 2024. Kondisi ini perlu diantisipasi agar dampak hoax dan dis-mis informasi tidak meluas. Di waktu yang kurang lebih berdekatan, Pemerintah Pusat membuat program Linterasi Digital Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat termasuk di dalamnya pelajar dan mahasiswa.

Maka itu, tujuan penelitian ini untuk melihat Efektivitas Program Literasi Digital Nasional Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Digital pada Pemilih Pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Mengantisipasi Mis-Disinformasi Politik pada Pemilu 2024. Penelitian ini berlangsung di wilayah DIY. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Literasi Digital Nasional sudah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dilaksanakan di sejumlah sekolah dan kampus dengan menasar kalangan pelajar hingga mahasiswa. Ada dua indikator keberhasilan program literasi digital ini. Pertama, Indeks Literasi Digital DIY tertinggi secara nasional berturut-turut selama dua tahun (2021-2022). Kedua, program ini bisa disimpulkan efektif mengantisipasi hoax, dis-mis informasi jelang Pemilu 2024. Para pelajar-mahasiswa dalam mengonsumsi berita/informasi di media sosial lebih bijak. Dengan bekal Pilar Literasi Digital mereka tidak mudah termakan berita palsu maupun berita yang tidak jelas kebenarannya.

## PENDAHULUAN

Persaingan Pemilu 2024 mendatang diprediksi berbagai kalangan tak kalah sengit dengan Pemilu 2014 maupun 2019. Hingga saat ini setidaknya ada tiga kekuatan/koalisi yang masing-masing memiliki

kandidat sebagai Capres. Mendekati tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023, suhu politik tanah air makin memanas. Konsekuensinya, potensi mis-disinformasi politik hingga malinformasi akan makin meningkat. Dilansir dari cekfakta.com, Ganjar Pranowo dan Anies Bawesdan menjadi korban serangan konten disinformasi politik. Dalam postingan di media sosial, Bacapres yang diusung PDI-P dan PPP ini dinarasikan mengonsumsi alkohol. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sementara, Bacapres yang diusung Nasdem, PKS dan Demokrat tersebut dalam sebuah akun facebook sedang membaca buku “How to Lie”. Setelah ditelusuri, gambar tersebut merupakan hasil editan. Hal sama juga menimpa Prabowo Subianto. Bacapres yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan ini dalam postingan dinarasikan akan memberikan hadiah Rp170 juta bagi yang mendukung dia. Namun setelah dicek, Prabowo tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu.

Kondisi ini juga terjadi saat jelang Pemilu 2014 dan 2019. Mengutip data Tirto.id dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) pada Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020, jumlah penyebaran berita hoaks isu politik mencapai 2.350 kasus (CNBC Indonesia, 2019). Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat bahwa dari September hingga Desember 2020 terdapat sekitar 1.200 kasus berita hoaks (Kompas.com, 2020)

Di sisi lain, indeks atau skor literasi digital di Indonesia berada dalam kondisi sedang. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kapasitas literasi digital masyarakat Indonesia masuk level sedang, yakni sebesar 3.54 dari 5.00. Maksudnya, masyarakat akan mudah termakan dengan berita yang mereka baca atau tonton, tanpa cek fakta/kebenarannya. Sementara itu, pengguna internet di Indonesia tidak bisa dikatakan jumlahnya sedikit. Merujuk laporan HootSuite dan We Are Social, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta jiwa pada Pebruari 2022. Angka ini bertambah 2,1 juta dari tahun 2021. Jumlah Itu merupakan 73,7% dari total populasi Indonesia, dengan persentase pengguna internet melalui ponsel mencapai 94,1%.

Mengacu pada Laporan Pemetaan Hoaks Semester I Tahun 2021 yang dirilis Mafindo (2023), kasus disinformasi mengalami peningkatan (total jumlah mencapai 1.049). Dalam dokumen ini, tema hoaks politik menduduki posisi teratas, yaitu 25%. Data ini bisa disaksikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hoaks Per bulan Semester I 2021

| No    | Bulan    | Frekuensi | %    |
|-------|----------|-----------|------|
| 1     | Januari  | 226       | 21.5 |
| 2     | Februari | 189       | 18   |
| 3     | Maret    | 153       | 14.6 |
| 4     | April    | 180       | 17.2 |
| 5     | Mei      | 166       | 15.8 |
| 6     | Juni     | 135       | 12.9 |
| Total |          | 1.049     | 100  |

Tabel 2. Tema Hoaks Semester 1 2021

| No    | Tema         | Jml   | %    |
|-------|--------------|-------|------|
| 1     | Agama        | 61    | 5.8  |
| 2     | Politik      | 268   | 25   |
| 3     | Etnis        | 8     | 0.8  |
| 4     | Bisnis       | 11    | 1    |
| 5     | Penipuan     | 78    | 7.4  |
| 6     | Kesehatan    | 247   | 23.5 |
| 7     | Bencana      | 35    | 3.3  |
| 8     | Kriminalitas | 25    | 2.4  |
| 9     | Lain-lain    | 322   | 30.8 |
| Total |              | 1.049 | 100  |

Sumber: Mafindo (2023)

Data di atas menguatkan sebuah kondisi di mana mis-disinformasi politik merupakan ancaman nyata pada Pemilu 2024. Jika tidak dikelola dan dimitigasi, mis-disinformasi politik bisa berdampak pada terganggunya stabilitas politik nasional. Maka, langkah-langkah kontra disinformasi seperti moderasi konten hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan literasi digital melalui Program Literasi Digital Nasional menjadi hal krusial. Program Literasi Digital Nasional dicanangkan langsung Presiden Joko Widodo pada Tahun 2021. Melalui program ini, masyarakat didorong meningkatkan kecakapan digital agar mampu meminimalkan konten negatif yang membanjiri ruang digital.

Maka, sebagai pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana Efektivitas Program Literasi Digital Nasional Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Digital pada Pemilih Pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Untuk Mengantisipasi Mis-Disinformasi Politik pada Pemilu 2024?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Literasi Digital Nasional Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Digital pada Pemilih Pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Untuk Mengantisipasi Mis-Disinformasi Politik pada Pemilu 2024.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Efektivitas

#### 1) Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata “efek” yang berarti hubungan sebab-akibat. Efektivitas dapat dianggap sebagai variabel terpisah. Efektivitas berarti suatu tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai atau suatu tujuan dapat tercapai karena suatu proses. Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi efektivitas. Menurut James L Gibson (Pasalong, 2013: 4), efisiensi dicapai melalui upaya kolektif. Sondan P. Siagian (2001:-204) mengartikan efektivitas sebagai pemanfaatan sejumlah sumber daya, sarana, dan prasarana, yang secara sadar ditentukan sebelumnya, untuk menghasilkan sekumpulan barang dalam pelayanan terhadap kegiatan yang dilakukan bermaksud melakukan hal tersebut. Ali Muhidin (2009) juga menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana tujuan dan hasil dicapai, tingkat kapasitas fungsional, dan tingkat faktor serta masalah pengguna. Menurut Handyaningrat dalam Nuraida (2019), efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apabila tujuan tersebut tidak sesuai maka program dianggap tidak efektif.

Berdasarkan definisi para ahli mengenai efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dengan melibatkan penggunaan sumber daya dengan optimal dalam suatu kegiatan.

#### 2) Indikator Efektivitas Program

Efektivitas program adalah metode untuk menentukan kesesuaian antara hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Budiani dan Subakyo (2007), indikator efektivitas program adalah:

- a) Ketepatan tujuan program, ketepatan antara tujuan peserta dan tujuan program.
- b) Sosialisasi program. Tentang penyaluran informasi kepada peserta program.
- c) Ketepatan antara tujuan program, hasil dan tujuan sebelumnya.
- d) Pemantauan. Berkaitan dengan pemantauan apakah program memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Richard M. Steers (1985) indikator efektivitas program meliputi:

- a) Pencapaian tujuan, usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- b) Adaptasi, penyesuaian yang dilakukan suatu organisasi dalam menentukan tujuan dan sarana kegiatannya.

Kemudian menurut Sutrisno (2010), indikator efektivitas program terdiri atas:

- a) Memahami program, tujuan dari program adalah memahami program secara nyata agar dapat berjalan dengan lancar.
- b) Ketepatan sasaran. Sasaran harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan program akan efektif jika dilaksanakan tepat waktu.
- c) Pencapaian Tujuan, Program yang efektif adalah program yang mencapai tujuan tertentu.
- d) Perubahan Nyata: Suatu program dikatakan efektif jika menghasilkan perubahan nyata yang secara langsung membawa tujuan program tersebut.

### 3) Kriteria Efektivitas

Tingkatan efektivitas dapat diamati dari hasil yang telah diperoleh, apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif jika hasil yang diperoleh tidak tepat sasaran. Maka dari itu, diperlukan kriteria efektivitas. Menurut Krech *et al.* (2012:119-120) menyatakan kriteria efektivitas sebagai berikut :

- a) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, kegiatan atau program. Hasil yang dimaksud dapat berupa perbandingan antara masukan dan keluaran dan presentase pencapaian program kerja.
- b) Tingkat kepuasan yang diperoleh. Ukuran dalam efektivitas dapat berupa kuantitatif (berdasarkan pada jumlah) atau kualitatif (berdasarkan dari mutu).
- c) Produk Kreatif. Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
- d) Intensitas yang akan dicapai. Memiliki ketaatan yang tinggi dalam sesuatu dimana adanya rasa memiliki dengan kadar yang tinggi.

### B. Misinformasi dan Disinformasi

Misinformasi sendiri dapat didefinisikan sebagai informasi yang salah, tidak akurat, atau menyesatkan. Disinformasi, di sisi lain, mengacu pada penyebaran, pernyataan, atau penyebaran informasi yang salah, palsu, atau menyesatkan dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau membingungkan. Oleh karena itu, disinformasi sering disebut dengan disinformasi sikap (Fretzer, Magazine). Dalam beberapa kasus, sumber disinformasi diketahui (disinformasi publik).

Namun, disinformasi ini dapat disembunyikan tanpa mengidentifikasi diri sendiri atau dengan memberikan informasi identitas yang menyesatkan (disinformasi terselubung). Meskipun kuantitas dan kualitas disinformasi sulit untuk dinilai, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penipuan (Fretzer, Magazine).

Pernyataan ini menegaskan kembali bahwa sumber informasi dapat berasal dari siapa pun atau apa pun, dan sumber tersebut dapat terlihat jelas atau tersembunyi.

Orang membicarakan kebohongan ketika:

- a) Membuat pernyataan seolah-olah itu benar.
- b) Mereka tahu itu palsu.
- c) Untuk tujuan yang menyesatkan.

Tidak semua kasus pernyataan palsu dapat dianggap bohong.

Terdapat berbagai jenis atau derajat disinformasi, yang mungkin dapat membantu menjelaskan beberapa jenis disinformasi. Misalnya, informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak akurat tidak dapat diklasifikasikan sebagai disinformasi kecuali informasi tersebut mempunyai dimensi obyektif. Namun, segala bentuk ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau salah saji yang didasarkan pada tujuan tertentu dianggap disinformasi. Tingkat disinformasi ini terjadi ketika sumber menyajikan informasi dengan maksud untuk menyesatkan, memutarbalikkan, atau menyalahgunakan sasaran.

## METODE PENELITIAN

Lokasi riset ini akan dilakukan di Dinas Kominfo dan Kemenag DIY. Dua instansi itu yang telah menyelenggarakan Program Literasi Digital Nasional di wilayah DIY. Penelitian ini bersifat interpretatif menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2010), penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada

realitas independen yang berada diluar mereka. Metode penelitian dapat disaksikan dalam skema di bawah ini.

Wawancara akan dilakukan dengan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Agama (Kemenag) DIY serta perwakilan peserta program literasi digital nasional. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati perilaku masyarakat yang telah mengikuti program literasi digital. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan sejumlah *stakeholders* (akademisi, praktisi dan pejabat terkait).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketepatan Sasaran Program

Salah satu lokasi pelaksanaan Program Literasi Digital Nasional berlangsung di MAN 5 Sleman. Kegiatan ini berlangsung pada Tahun 2023 dan diikuti oleh siswa kelas 12. Dilihat dari peserta dan tujuan, program ini sudah sesuai. Karena pelajar merupakan pihak yang paling aktif menggunakan media sosial. Dengan demikian potensi terpapar dis-mis informasi politik menjelang Pemilu 2024 sangatlah besar. Dengan sasaran pelajar yang merupakan pemilih pemula maka tujuan Program Literasi Digital Nasional ini efektif untuk meningkatkan literasi digital bagi pemilih pemula di Pemilu 2024.

Mengacu data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, sepanjang tahun 2023 telah diadakan kegiatan literasi digital, baik di sekolah maupun di sejumlah kampus. Dalam kegiatan ini menysasar kalangan pelajar-mahasiswa. Dengan demikian dikaitkan dengan pencegahan hoak, dis-mis informasi jelang Pemilu 2024 maka sangat relevan. Sebab pelajar-mahasiswa merupakan kelompok pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

### 2. Sosialisasi Program

Dalam Program Literasi Digital Nasional yang berlangsung di MAN 5 Sleman, peserta diberikan materi terkait pemilu dan juga bagaimana mengantisipasi berita hoak. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, berita hoak (dis-mis informasi) umumnya meningkat saat pemilu. Hal ini disampaikan Ridho, Siswa Kelas 12.

”Membahas tentang bagaimana kita sebagai pemilih pemula atau masih awam harus apa-apa dan harus dengan bagaimana. Lalu ada pemutaran video pendek yang menjelaskan tentang pemilu dan tentang hoak juga terus yang terakhir ada kita sebagai pemilih pemula itu harus berhati-hati dalam memilih calon-calon pemenang selanjutnya itu saja.” (Wawancara, 5 Februari 2024)

Sedangkan ditingkat DIY, program literasi digital ini cukup marak sebagai konten media sosial, online hingga media cetak. Sosialisasi melalui berbagai platform media diharapkan bisa berdampak luas pada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Demikian dalam indikator sosialisasi program ini bisa ditarik kesimpulan cukup efektif.

### 3. Tujuan Program

Peserta yang mengikuti Program Leterasi Digital Nasional di MAN 5 Sleman mengaku program tersebut cukup bermanfaat. Dalam kegiatan tersebut peserta mengetahui pilar literasi digital. Pilar literasi digital yaitu cakap bermedia, budaya bermedia digital, aman dan etis berbudaya digital.

“Kalau saya baru ketemunya di youtube itu sekitar 95% faktual dan ada datanya, sumber terpercaya, orangnya juga sudah inilah mengharuskan masyarakat untuk mudah dipercaya. Kalau Instagram hanya kadang lewat aja dan tidak sebanyak Youtube, hoak-hoak itu biasanya saya sudah tahu duluan. Seperti calon ini ngomongnya keliatan tuh dan *udah* curiga dari judulnya aja udah curiga kok bisa. Dan saya cari sendiri dan akhirnya hoak atau bohong lalu saya *block* aja biar tidak muncul lagi”. (Wawancara, 5 Februari 2024)

Sementara itu di tingkat DIY, peringkat literasi digital paling atas di antara provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2021 dan 2022, Indeks Literasi Digital di DIY tertinggi se-Indonesia. Data lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.** Indeks Literasi Digital 2021

| Peringkat | Provinsi                   | Indeks |
|-----------|----------------------------|--------|
| 1         | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3,71   |
| 2         | Kepulauan Riau             | 3,68   |
| 3         | Kalimantan Timur           | 3,62   |
| 4         | Sumatera Barat             | 3,61   |
| 5         | Gorontalo                  | 3,61   |

Sumber : Kementerian Kominfo

Dari tabel di atas, Indeks Literasi Digital DIY tahun 2021 berada di posisi tertinggi, kemudian disusul Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan urutan kelima Gorontalo.

Sedangkan Indeks Literasi Digital DIY tahun 2022 bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel. 4** Indeks Literasi Digital 2022

| Peringkat | Provinsi                   | Indeks |
|-----------|----------------------------|--------|
| 1         | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3,64   |
| 2         | Kalimantan Barat           | 3,64   |
| 3         | Kalimantan Timur           | 3,62   |
| 4         | Papua Barat                | 3,62   |
| 5         | Jawa Barat                 | 3,61   |

Sumber : Kementerian Komeninfo

Dari tabel di atas, Indeks Literasi Digital DIY tahun 2022 berada di posisi tertinggi, kemudian disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat dan urutan kelima Provinsi Jawa Barat.

#### 4. Perubahan Nyata

Program Literasi Digital berhasil mengubah peserta dalam mengonsumsi media sosial. Berita politik jelang Pemilu 2024 yang berseliweran di media sosial (Youtube, IG, Tiktok, X) tidak ditelan secara mentah-mentah. Jika menemukan sebuah isu di media digital, maka para pelajar akan berusaha mencari sumber lain sebagai pembandingan.

Hal ini dikatakan Arya, Siswa Kelas 12.

“Nggak dong, pasti harus difilter dulu pak, karena kan tidak tahu kejelasannya bagaimana. Nah kita sebagai yang suka konsumsi berita-berita kayak gitu yang pasti harus dicari tahu dulu kebenarannya, fakta atau hoax gitu. Terus gimana cara memfilternya, kadang tu akun-akun yang suka bikin hoax gitu mereka kan cari atensi dari orang-orang itu biar kontennya itu *rame* segala macam. Nah ya gimana caranya kita bikin akun itu kayak memblokir atau melaporkan sebagai spam dan harus mencari tau kebenarannya gimana karena kan info-info kayak gitu tidak bisa ditelan secar mentah-mentah karena bisa bahaya. Apalagi kita sebagai anak muda yang di tahun 2024 ini sebagian besar anak muda yang memilih”. (Wawancara, 5 Februari 202

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Program Literasi Digital Nasional sudah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dilaksanakan di sejumlah sekolah dan kampus dengan menasar kalangan pelajar hingga mahasiswa. Ada dua indikator keberhasilan program literasi digital ini. Pertama, Indeks Literasi Digital DIY tertinggi secara nasional berturut-turut selama dua tahun (2021-2022). Kedua, program ini bisa disimpulkan efektif mengantisipasi hoax, dis-mis informasi jelang Pemilu 2024. Para pelajar-mahasiswa dalam mengonsumsi berita/informasi di media sosial lebih bijak. Dengan berbekal Pilar Literasi Digital mereka tidak mudah termakan berita palsu maupun berita yang tidak jelas kebenarannya.

Sementara itu berdasarkan dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan perebuahan nyata bisa disimpulkan jika Program Literasi Digital Nasional efektif dalam mengantisipasi hoak, dis-mis informasi jelang Pemilu 2024.

## 2. Saran

Beberapa saran yang bisa diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Literasi Digital bisa dilakukan secara rutin dan terprogram.
2. Ada koordinasi yang baik oleh instansi terkait (Diskominfo) agar program ini berjalan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altheide, David, "Iran vs US TV News: The Hostage Story Out of Content," in Doris A Graber, 1984, Media Power in Politics, Washington: Congressional Quaterly Inc
- Bagdikian, Ben H., 2004, The New Media Monopoly, Boston: Beacon Press
- Barendt, 1985, Freedom of Speech, New Jersey: Routledge
- Bell, Daniel, 1973, The Coming of Post- Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Book
- Birkland, Thomas A., 2001, An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts and Models of Public Policy Making, New York: M.E Sharpe
- Blummer, Herbert, 1969, Symbolic Interaction Perspective and Method, New Jersey: Prentice Hall
- Blumler, Jay G and Gurevitch, Michel, " Politicians and the Press: An essay on Role Relationships " in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981, Handbook of Political Communication, Beverly Hill: Sage Publication
- Bryant, Jennings and Zillman, Dolf, " A Retrospective and Prospective Look at Media Effect, in Robin L. Nabi and Mary Beth Oliver,
- Cobb, Roger W., and Elder, Charles D, " Mass Communication and Public Policy, "in Dan D Nimmo and Keith R Sanders, 1981,
- Handbook of Political Communication, Beverly Hill: Sage Publication Cohen, Bernard C, 1963, The Press and Foreign Policy, New Jersey: Princeton University Press
- Siagian, S.P. (2007).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sutrisno, Edi. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana